

ANALISIS TINGKAT PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Narto Kaimudin¹⁾, Rasyid Thaha²⁾, Irwan Ade Saputra³⁾

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin

Correspondence author: N Kaimudin, nartokaimudin@gmail.com, Makassar, Indonesia

Abstract

Providing educational services is an essential component of community empowerment, as it enhances citizens' knowledge and skills. Educational services at the junior high school level aim to develop students' potential to support their social life and development. Although education in Central Maluku Regency has been implemented, the quality of its services remains low. This study aims to examine the factors contributing to the low quality of junior high school educational services in Central Maluku Regency. The research employed a qualitative approach, with the researcher as the main research instrument. The analysis of educational services refers to five service quality dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The findings indicate that the low quality of junior high school educational services is caused by inadequate and uneven distribution of educational facilities and infrastructure, unequal distribution of teachers, low government responsiveness to community needs, lack of guaranteed access to education, and limited government attention to improving educational service quality.

Keywords: educational services, junior high school, service quality, maluku tengah

Abstrak

Pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu berperan dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Meskipun penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan, kualitas pelayanannya masih dinilai rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis pelayanan pendidikan mengacu pada lima aspek kualitas pelayanan, yaitu tampilan fisik (*tangible*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), keterjaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pelayanan pendidikan SMP disebabkan oleh keterbatasan dan ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan, penyebaran tenaga pendidik yang belum merata, rendahnya daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, belum adanya jaminan akses pendidikan yang optimal, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Kata Kunci: kualitas layanan, pelayanan pendidikan, smp, maluku tengah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan daerah karena berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Ramlianto & Alrasyid, 2025). Upaya menciptakan dunia pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak cukup hanya dengan membangun masyarakat yang terpelajar, tetapi harus mampu menjadi landasan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknologi (Oltular, 2025). Dengan demikian, pelayanan pendidikan harus diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai inti (*core*) pembangunan daerah (Yu & Liu, 2025).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan (Naim, 2025). Minimnya kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan menjadi isu yang terus muncul (Agyei et al., 2024), disertai dengan keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan (Worku, 2025), jumlah dan mutu tenaga pendidik yang belum memadai serta penyebarannya yang tidak merata (Michopoulou, 2025), rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan, serta keterbatasan alokasi anggaran pendidikan. Kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban membiayainya serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan tanpa diskriminasi (Amiri, 2025).

Permasalahan pelayanan pendidikan tersebut juga terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ditemukan banyak anak

usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dan memilih bekerja sebagai buruh kasar di pasar, pelabuhan, maupun membantu orang tua di ladang. Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya sekitar 44,06% anak usia sekolah berusia 13–15 tahun yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, sebagian lainnya memilih berhenti sekolah atau melanjutkan pendidikan ke luar wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Selain rendahnya angka partisipasi sekolah, pelayanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah juga ditandai oleh adanya kesenjangan penyebaran fasilitas pendidikan antar negeri atau desa. Bangunan sekolah belum tersebar secara merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pendidikan, kondisi geografis, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik, buku pelajaran, fasilitas perpustakaan, serta jarak sekolah yang relatif jauh dari permukiman penduduk semakin memperkuat rendahnya kualitas pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Secara konseptual, pengelolaan pelayanan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, merupakan suatu proses yang terencana dan terorganisasi untuk menghasilkan perubahan positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Esguerra & Qunito, 2025). Dalam hal ini, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyelenggaraan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat

(Sandriani & Riofita, 2025; Yunus & Suratman, 2024).

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pendidikan dan realitas pelayanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Kesenjangan inilah yang mengindikasikan bahwa pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maluku Tengah masih belum optimal dan memerlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif (Waruwu, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena pelayanan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan menganalisis makna di balik proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dialami oleh para pemangku kepentingan.

Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan faktual mengenai kondisi pelayanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah, meliputi aspek sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan desain penelitian ini, peneliti dapat mengungkap secara komprehensif berbagai permasalahan dan dinamika yang memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan (*uncover*) dan memahami (*understand*) secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan adanya interpretasi yang kontekstual dan holistik terhadap fenomena yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat (Bazarah et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan modern, pemerintah dituntut untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelayanan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan lembaga dan fasilitas pendidikan, tetapi juga mencakup kemudahan akses, pemerataan layanan, serta jaminan mutu pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Urgensi pelayanan pendidikan semakin meningkat karena pendidikan berperan strategis dalam membentuk kemampuan, keterampilan, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam pelayanan pendidikan diarahkan pada upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi agen perubahan sosial dan pembangunan daerah. Keberhasilan pelayanan pendidikan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Karakteristik Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan memiliki karakteristik padat karya dan padat modal, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (Randan et al., 2025). Pelayanan pendidikan juga dipandang sebagai *public goods*, di mana pemerintah berperan sebagai penyedia utama yang bertanggung jawab atas pemerataan dan kualitas layanan (Laia et al., 2025).

Karakteristik pelayanan pendidikan menuntut adanya akses yang mudah, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas penyelenggaraan, keadilan distribusi sumber daya, penerimaan sosial, serta efisiensi dan ekonomis. Karakteristik tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ketersediaan fasilitas, keandalan layanan, ketanggapan aparatur, jaminan mutu, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.

Komponen Kualitas Pelayanan Pendidikan

Kualitas pelayanan pendidikan dapat dinilai melalui perbandingan antara harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima secara nyata (Akhyar, 2023). Apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan, maka pelayanan dinilai berkualitas. Dalam penelitian ini, penilaian kualitas pelayanan pendidikan mengacu pada lima dimensi utama, yaitu: bukti fisik (*tangible*), daya tanggap (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Kelima dimensi tersebut menjadi kerangka analisis untuk memahami kondisi pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah.

1. Aspek Bukti Fisik (*Tangibles*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek bukti fisik pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah masih belum

memadai dan belum merata. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas sanitasi, terutama di wilayah pedalaman, berdampak pada rendahnya kualitas proses pembelajaran.

Perbedaan kondisi geografis antar kecamatan menyebabkan ketimpangan penyediaan fasilitas pendidikan, sehingga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan belum sepenuhnya terjamin. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek *tangible* masih menjadi kelemahan utama dalam pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah.

2. Aspek Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap pemerintah dalam pelayanan pendidikan SMP dinilai masih rendah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan penanganan permasalahan pendidikan di wilayah terpencil. Keterbatasan jumlah dan kompetensi guru, serta lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan sekolah, menghambat efektivitas pelayanan pendidikan.

Kurangnya responsivitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat menyebabkan pelayanan pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab harapan masyarakat. Padahal, daya tanggap merupakan indikator penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

3. Aspek Keandalan (*Reliability*)

Keandalan pelayanan pendidikan tercermin dari kemampuan aparat dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas secara konsisten, tepat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keandalan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait profesionalisme guru, konsistensi pelaksanaan kurikulum, serta pemanfaatan sarana pendukung pembelajaran.

Keterbatasan kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Keandalan pelayanan pendidikan menuntut adanya peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendidik secara berkelanjutan.

4. Aspek Jaminan (*Assurance*)

Aspek jaminan dalam pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait dengan jaminan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kebijakan pendidikan daerah cenderung lebih berfokus pada peningkatan partisipasi sekolah dibandingkan peningkatan kualitas layanan.

Kurangnya jaminan kesejahteraan guru berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Padahal, jaminan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan.

5. Aspek Empati (*Empathy*)

Empati pemerintah dalam pelayanan pendidikan tercermin dari perhatian terhadap kebutuhan, harapan, dan kondisi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan dan komunikasi dengan masyarakat masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman.

Keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan empati dan partisipasi publik, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan respons kebijakan yang konkret. Kurangnya empati pemerintah berimplikasi pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

Sintesis Pembahasan

Sintesis pembahasan ini menegaskan bahwa rendahnya kualitas pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maluku Tengah bukan semata-mata disebabkan oleh satu faktor

tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari kelemahan sistemik pada lima dimensi kualitas pelayanan pendidikan, yaitu *tangible*, *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, dan *empathy*, yang saling berkaitan dan diperkuat oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

1. *Tangible* (Bukti Fisik)

Secara substansial, permasalahan utama pada dimensi *tangible* adalah kurangnya dan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas, minimnya perpustakaan dan laboratorium, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai, terutama di wilayah pedalaman. Apa (*what*) yang terjadi adalah ketimpangan kualitas fasilitas antarwilayah; di mana (*where*) ketimpangan paling nyata terlihat pada kecamatan terpencil dan wilayah kepulauan; dan siapa (*who*) yang terdampak adalah peserta didik dan tenaga pendidik yang menjalankan proses belajar mengajar dalam kondisi terbatas.

Secara analitis, mengapa (*why*) kondisi ini terjadi berkaitan dengan belum optimalnya arah kebijakan anggaran pendidikan daerah. Anggaran pendidikan cenderung lebih difokuskan pada belanja rutin dan administratif dibandingkan belanja modal untuk pengadaan maupun perawatan sarana prasarana. Selain itu, keterbatasan kapasitas perencanaan berbasis kebutuhan wilayah menyebabkan pembangunan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya mempertimbangkan diferensiasi spasial dan aksesibilitas masyarakat. Bagaimana (*how*) dampaknya terlihat dari rendahnya kualitas proses pembelajaran, menurunnya motivasi belajar siswa, serta terbatasnya kesempatan pengembangan kompetensi peserta didik.

2. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pada dimensi *responsiveness*, permasalahan yang muncul adalah rendahnya daya tanggap pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan aktual sekolah dan masyarakat. Apa (*what*) yang terjadi

adalah keterlambatan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, lambannya penanganan keluhan sekolah, serta kurang adaptifnya kebijakan pendidikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kapan (*when*) kondisi ini tampak adalah ketika sekolah menghadapi kekurangan guru atau fasilitas, namun respons kebijakan tidak segera hadir.

Mengapa (*why*) daya tanggap pemerintah masih rendah dapat ditelusuri pada lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Mekanisme penyampaian aspirasi dan kebutuhan pendidikan belum berjalan efektif, sehingga informasi dari lapangan sering tidak segera diterjemahkan menjadi kebijakan operasional. Bagaimana (*how*) implikasinya terlihat dari ketidaksesuaian pelayanan pendidikan dengan harapan masyarakat serta meningkatnya persepsi publik bahwa pemerintah kurang hadir dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.

3. *Reliability* (Keandalan)

Dimensi *reliability* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan tenaga pendidik dalam memberikan pelayanan pendidikan secara konsisten, tepat, dan sesuai standar. Apa (*what*) yang menjadi masalah adalah belum optimalnya konsistensi pelaksanaan kurikulum, ketidakteraturan proses pembelajaran, serta keterbatasan profesionalisme sebagian tenaga pendidik. Siapa (*who*) yang berperan penting di sini adalah aparaturnya dinas pendidikan dan guru sebagai pelaksana utama layanan pendidikan.

Mengapa (*why*) keandalan pelayanan belum tercapai antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan berkelanjutan terhadap guru, keterbatasan pelatihan peningkatan kompetensi, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pendidikan. Bagaimana (*how*) dampaknya tercermin pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik

yang belum optimal, khususnya di sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya.

4. *Assurance* (Jaminan)

Permasalahan pada dimensi *assurance* berkaitan dengan belum adanya jaminan kuat terhadap mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik. Apa (*what*) yang terjadi adalah belum konsistennya penerapan standar pelayanan minimal pendidikan serta kurangnya jaminan kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil. Mengapa (*why*) kondisi ini terjadi karena kebijakan pendidikan daerah masih lebih menekankan peningkatan partisipasi sekolah daripada penguatan kualitas dan mutu layanan.

Bagaimana (*how*) implikasinya terlihat pada menurunnya motivasi dan kinerja tenaga pendidik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas proses pembelajaran. Tanpa jaminan kebijakan yang jelas terkait standar mutu dan kesejahteraan guru, pelayanan pendidikan sulit mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

5. *Empathy* (Empati)

Dimensi *empathy* menunjukkan sejauh mana pemerintah memahami dan merespons kebutuhan serta harapan masyarakat. Apa (*what*) yang menjadi persoalan adalah rendahnya perhatian pemerintah terhadap kondisi riil sekolah dan peserta didik, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran dan kemudahan akses pendidikan. Siapa (*who*) yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di wilayah pedalaman dan kelompok ekonomi lemah.

Mengapa (*why*) empati pemerintah belum optimal berkaitan dengan pendekatan kebijakan yang masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Bagaimana (*how*) dampaknya terlihat dari rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan serta terbatasnya rasa memiliki (*sense of*

ownership) masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Secara keseluruhan, kelima dimensi kualitas pelayanan pendidikan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu mata rantai permasalahan pelayanan pendidikan SMP di Kabupaten Maluku Tengah. Kelemahan pada aspek *tangible* diperkuat oleh rendahnya *responsiveness*, diperparah oleh lemahnya *reliability*, tidak ditopang oleh *assurance* yang memadai, dan akhirnya diperlemah oleh kurangnya *empathy* pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan pendidikan menuntut pendekatan kebijakan yang holistik, terintegrasi, dan kontekstual, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan daerah.

D. PENUTUP

Pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Maluku Tengah masih tergolong rendah, yang ditandai oleh belum meratanya dan belum memadainya aspek tampilan fisik (*tangible*), lemahnya daya tanggap dan keandalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan proses pembelajaran (*responsiveness* dan *reliability*), belum adanya jaminan kebijakan standar pelayanan dan kompetensi pendidik (*assurance*), serta rendahnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat (*empathy*). Kondisi tersebut semakin kompleks karena dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah yang tersebar, serta faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat, yang menuntut adanya koordinasi dan kebijakan pelayanan pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara komprehensif melalui penguatan

kelima dimensi kualitas pelayanan pendidikan. Secara praktis, upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan dengan memperhatikan diferensiasi spasial wilayah, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik terutama di daerah terpencil, pengalokasian anggaran pendidikan yang memadai untuk mendukung mutu pembelajaran, perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan yang meringankan beban masyarakat, serta sosialisasi layanan pendidikan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses dan mutu pendidikan, tetapi juga mewujudkan tujuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sumber daya manusia yang terpelajar dan berbudaya sebagai aset pembangunan daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agyei, E. A., Annum, S. K., Acquah, B. Y. S., Sebu, J., & Agyei, S. K. (2024). Education infrastructure inequality and academic performance in Ghana. *Heliyon*, *10*(14), e34041. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34041>
- Akhyar. (2023). Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, *6*(2), 103–113. <https://doi.org/10.33627/pk.62.1246>
- Amiri, S. M. H. (2025). Beyond Access: Measuring the Impact of Equitable Education Policies on Marginalized Communities. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *9*. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.907000186>
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep pelayanan publik di Indonesia (Analisis literasi penyelenggaraan pelayanan publik di

- Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105–122. <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>
- Esguerra, R. A., & Qunito, D. (2025). Teachers' professional development and school leadership management. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.12010001>
- Laia, S. R. A., Parawanza, A. A., Manihuruk, S. D., Febina, J., & Tampubolon, Y. (2025). Tinjauan Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13802–13808. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4008>
- Michopoulou, K. (2025). The Principle of Equality in Education: Exploring the Legal Aspects of the Right to Inclusive and Equitable Quality Education for Achieving the Development of a Democratic Citizenship. *European Journal of Education and Pedagogy*, 6(2), 64–69. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2025.6.2.940>
- Naim, A. (2025). Equity across the educational spectrum: innovations in educational access crosswise all levels. *Frontiers in Education*, 9, 1499642. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1499642>
- Oltulular, S. (2025). Human Capital Dynamics Are the Key to Economic Growth : Source of Value of the Future. *Economies*, 13(8), 235. <https://doi.org/10.3390/economies13080235>
- Ramlianto, R., & Alrasyid, H. (2025). Pemberdayaan Pendidikan di Laensasi, Filipina: Integrasi Wawasan Kebangsaan, Keterampilan Mengajar dan Aksi Kemanusiaan. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 5(2), 715–732. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v5i2.5069>
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 101–107. <https://doi.org/10.1610/kb7fth71>
- Sandriani, S., & Riofita, H. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15165–15169. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27891>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Worku, M. Y. (2025). Access-equity tensions in education: Examining Ethiopia's educational reforms through a distributive social justice lens. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101443. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.saho.2025.101443>
- Yu, L., & Liu, Y. (2025). Education levels and high-quality economic development. *Finance Research Letters*, 80, 107228. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107228>
- Yunus, M., & Suratman. (2024). Peran Institusi Pemerintah Dan Masyarakat Di Dalam Meningkatkan Mutu. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 10(2), 115–121. <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i2.25539>
-